

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN (STUDI SINKRONISASI HUKUM)**

SKRIPSI

Oleh

Rustya Puji Lestari

NIM. 05020120082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustya Puji Lestari
NIM : 05020120082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Studi Sinkronisasi Hukum)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Rustya Puji Lestari

NIM. 05020120082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

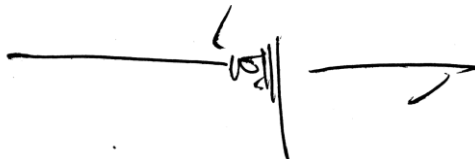
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rustya Puji Lestari
NIM. : 05020120082
Judul : Analisis Yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Studi Sinkronisasi Hukum)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.

NIP. 19790801201101012003

PENGESAHAN

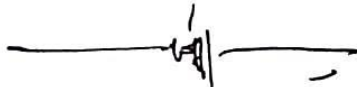
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rustya Puji Lestari
NIM. : 05020120082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



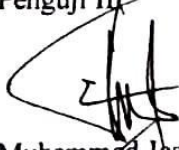
Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II



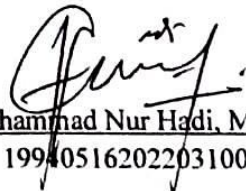
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 7 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Deban,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RUSTYA PUJI LESTARI
NIM : 05020120082
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rustyapujilestari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA
AGAMA DAN KEPERCAYAAN (STUDI SINKRONISASI HUKUM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2024

Penulis



(RUSTYA PUJI LESTARI)

ABSTRAK

Adanya larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belakangan ini menjadi polemik dan juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang setuju karena mengagap SEMA tersebut telah selaras dengan UUP dan ada juga pihak yang tidak setuju karena SEMA tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Undang Undang Adminduk, dan Undang Undang HAM. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023; dan bagaimana analisis yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, kamus hukum, dan juga karya ilmiah yang punya relevansi dengan isu yang tengah dibahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menerapkan metode analisis deskriptif deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kejelasan dan kesatuan penerapan hukum dalam memutus permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, mengingat adanya dorongan dan kritik dari berbagai pihak mengenai banyak dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri. Adanya aturan mengenai larangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ada dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai telah sinkron dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dan juga sinkron dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut tidak sinkron dengan apa yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UUD NRI Tahun 1945. Karena Undang-Undang dan SEMA berada dalam hierarki yang berbeda, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferior*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan apabila tujuan awalnya adalah untuk memberikan kesatuan dan kepastian dalam penerapan hukum mengenai adanya aturan tentang larangan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, maka seharusnya aturan tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang dan bukan melalui SEMA. Selain itu, bagi pemerintah perlu untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi apabila membuat suatu aturan atau kebijakan agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) peraturan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	27
A. Pencatatan Perkawinan.....	27
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	27

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	29
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	32
4. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	36
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	39
C. Pengaturan Terkait Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	49
1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
2. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	53
3. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	62
4. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	66
5. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	69

BAB III LARANGAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023..... 73

A. Sejarah Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	73
1. Periode Sebelum Kemerdekaan.....	73
2. Periode Kemerdekaan Sampai dengan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	76
3. Periode Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974....	79

B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	86
C. Tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	89
D. Dampak dari Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.....	91
BAB IV ANALISIS DAN SINKRONISASI TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAINNYA	96
A. Analisis terhadap Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	96
B. Sinkronisasi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Beberapa Aturan Perundang-Undangan.....	100
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	127

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Aprita, Sertika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Aris and Iin Mutmainnah. *Problematika Perkawinan Beda Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesi Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hamidi, Jazil, Ria Casmi Arrasa, Nurul Laili Fadhilah, Yasmin Mautie, Bahrul Ulum Annafi', Danu Budi Iswara, and Arming. *Teori Dan Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press, 2012.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Bnadar Lampung: Harakindo Publishing, 2019.
- Qamar, Nurul and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2016.

Jurnal:

- Akmal, Diya Ul. “Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020).
- Andri, Muhammad and Kuswanto. “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 7, no. 2 (September 2022).
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (July 2015).
- Asriati. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (January 2012).
- Azhari, Wildan Habib and Fauziah Lubis. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).
- Bahri, A. Syamsul and Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 2020).
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia.” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 4, no. 1 (2020).
- Budiyono. “Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia.” *Yustisia* 2, no. 2 (Mei-Agustus 2013).
- Cantonia, Sindy and Ilyas Abdul Majid. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang

- Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (June 2021).
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2023): 40–64.
- Erleni. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Desember 2022).
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (February 2012).
- Faishol, Imam. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia.” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 2 (June 2019).
- Fathudin, Syukri and Vita Fitria. “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 15, no. 1 (April 2010).
- Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (Agustus 2011).
- Fatoni, Siti Nur and Iu Rusliana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung.” *Varia Hukum* 1, no. 1 (January 2019).
- Foresty, Cindy Silvy, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, and Entin Hidayah. “Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 2016).
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi and Gunawan Djajaputra. “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (September 2023).
- Hanafi, Muhammad Fikri and Sunny Ummul Firdaus. “Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022).
- Hasyiyati, Astrid Amidiaputri, Budi Hermono, and Nurul Hikmah. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam Dan Katolik,

- Studi Kasus: Penetapan No. 916/ Pdt.P/2022/PN Sby.” *Notaire* 6, no. 2 (2023).
- Indrayanti, Kadek Wiwik. “Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016).
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020).
- Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (July 2018).
- Jati, Imam Wahyu. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 2022).
- Kaharuddin and Syafruddin. “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (March 2020).
- Khairunnisa, Raafilia and Ramdan Fawzi. “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 (July 2022).
- Kharisma, Bintang Ulya. “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan).” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (July 2022).
- . “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (June 2023).
- Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (June 2015).
- Ma’sum, Endang Ali. “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya.” *Musawa* 12, no. 2 (July 2013).

- Muchimah. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *Volksgeist* 1, no. 2 (Desember 2018).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Natasha, Shela. "Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum (Abolition Of Population And Legal Rules Classification Article To Create Unification In Law)." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018).
- Nugraha, Mifta Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Privat Law* 1, no. 1 (June 2013).
- Nurcholish, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11 (2014).
- Prasetya, Vestwansan Dipa. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Online Mahasiswa* 7, no. 1 (June 2020).
- Prasetyo, Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (March 2020).
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (January 2023).
- Rinaldi, Aurora Putri, Fahmi, and Muhammad Azani. "Kewenangan Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Semnashum* 1, no. 1 (2023).

- Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (June 2020).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Saputra, Muhamad Arsy Surya and Lina Jamilah. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).
- Saya, Hendrik Nathanael. "Perlindungan Hak Membentuk Ikatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, no. 1 (2020).
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (February 2021).
- Simamora, Janpatar. "Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis (Analyzing Substance of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia as a Written Fundamental Norm)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015).
- Surawardi and Ahmad Riyadh Maulidi. "Different Religion Marriage in Islamic View." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 6, no. 1 (2022).
- Syam, Annisa Muthia Al-Qadri and Dwi Handayani Salle. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020).
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (April 2023).
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017).
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (Desember 2011).

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 2020).

Widanarti, Henri. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (February 2019).

Yasin, Dikson T. "Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran)." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016).

Yusmiati. "Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 1 (2018).

Skripsi dan Tesis:

Affandi, Ahmad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Baedowi, Ahmad. "Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Bimadani, Rizky Mustaqim. "Tinjauan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia." Skripsi, Universitas Borneo, 2018.

Firtiani, Arini Alfi. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo Dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.

Insani, Fiftahul Rizki. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Sel)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

- Novita, Puteri Mela. “Kedudukan Waris Perdata Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Purwoko, Arif. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Di Kabupaten Wonogiri.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Saputra, Deny. “Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Sayuna, Inche. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Setya, Hariski Romadona. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Siti Rofiqotul Hidayah. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Syaifudin, Ahmad Syahri. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Website:

- Asmu’i Syarkowi. “Akhir Sebuah Ketidaksatuan Pendapat (Hukum),” October 18, 2023. Accessed October 18, 2023. <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/823-akhir-sebuah-ketidaksatuan-pendapat-hukum>.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. “Dukung SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Sultan: Hukum Indonesia Menghormati Dan Mengadopsi Hukum

Agama,” July 20, 2023. Accessed November 28, 2023. <https://dprd.go.id/daftar-berita/dukung-sema-nomor-2-tahun-2023-sultan-hukum-indonesia-menghormati-dan-mengadopsi-hukum-agama>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “HNW Apresiasi Terbitnya SEMA Larang Hakim Kabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama,” July 19, 2023. Accessed November 25, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45611/t/HNW%20Apresiasi%20Terbitnya%20SEMA%20Larang%20Hakim%20Kabulkan%20Permohonan%20Pencatatan%20Perkawinan%20Beda%20Agama>.

Dispermadesdukcapil Prov.Jateng. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Pencatatan Sipil,” 2018. Accessed October 18, 2023. <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/36-pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-pencatatan-sipil>.

Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit. “Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi Atau Kemunduran Hukum?,” 2023. Accessed October 18, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.

Kamil, Irfan and Novianti Setuningsih. “PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan Di Dukcapil, Ini Pertimbangannya,” September 15, 2022. Accessed October 17, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019. Accessed November 18, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

Kementerian Agama. “Al-Qur’an dan Terjemah Online, Q.S. al-Baqarah.2 Ayat: 221.”

———. “Al-Qur’an dan Terjemah Online, Q.S. al-Maidah.5 Ayat: 5.”

Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim

Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” July 27, 2023. Accessed November 11, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan#:~:text=Komnas%20Perempuan%20menyatakan%20keprihatinan%20atas,Yang%20Berbeda%20Agama%20dan%20Kepercayaan.>

Komnas Perempuan, “Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022,” 2022. Accessed February 27, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/937>.

KOMPAS TV. *MA Terbitkan Pedoman SEMA No 2 Tahun 2023 Soal Perkawinan Beda Agama - MA NEWS*, May 9, 2023. Accessed November 25, 2023. <https://youtu.be/EAQlu6MB0j8?si=iJ78mpjMu841PBjf>.

M. Ishom el-Saha. “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,” July 19, 2023. Accessed October 18, 2023. <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*, 2023. Accessed October 18, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2023/detail>.

Praditya Fauzi Rahman. “Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama,” June 20, 2022. Accessed October 17, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6137699/penjelasan-pn-surabaya-soal-pengabulan-permohonan-nikah-beda-agama>.

Putri, Nindiasanda Frengky. “Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2015. Accessed November 29, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/35616-ID-keabsahan-perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-setelah-ada-keputusan-mahkamah-konsti.pdf>.

Razali, Ubed Bagus. “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan,” July 8, 2023. Accessed October 30, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8#:~:text=Pada%2017%20Juli%202023%20lalu,Yang%20Berbeda%20Agama%20dan%20Kepercayaan.>

Redaksi Suara 'Aisyiyah. “Bagaimana Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Yang Terlanjur Terjadi?,” July 29, 2023. Accessed November 28, 2023. [https://suaraaisyiyah.id/bagaimana-status-hukum-anak-hasil-perkawinan-beda-agama-yang-terlanjur-terjadi/.](https://suaraaisyiyah.id/bagaimana-status-hukum-anak-hasil-perkawinan-beda-agama-yang-terlanjur-terjadi/)

Rudy Hendra Pakpahan. “Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” December 16, 2015. Accessed October 18, 2023. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.>

Saiful, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,” February 4, 2013. Accessed February 27, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24.>

SETARA Institute. “SEMA 2/2023 Tidak Kompatibel Dengan Kebinekaan Dan Negara Pancasila,” July 20, 2023. Accessed November 25, 2023. [https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila/.](https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebinekaan-dan-negara-pancasila/)

UNAIR News. “Tinjauan Kritis Dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023,” August 25, 2023. Accessed October 18, 2023. [https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/.](https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/)

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

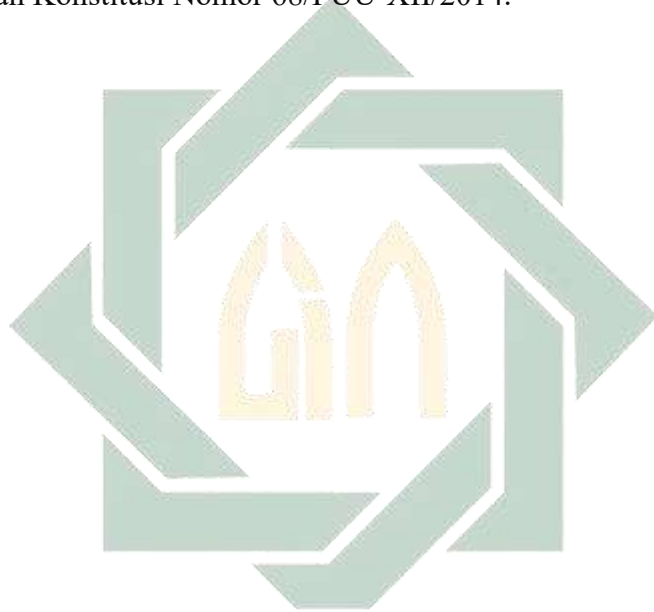
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A